

ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Heni Apriana, Erwin Putubasai
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
e-mail : erwinputubasai@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana good governance di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, questioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung tabel frekwensi dan prosentase. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut good governance di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sudah dapat dilaksanakan dengan baik, adapun indikatornya antara lain partisipasi aktif, tegaknya transparansi hukum, transparansi, responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang dimana kendala itu dapat diselesaikan dengan bersama-sama dengan unsur pemerintahan dan masyarakat juga pihak terkait yang berkepentingan dengan perencanaan pembangunan ekonomi.

Kata kunci : *good governance*, perencanaan, pembangunan ekonomi

ABSTRACT

The aim of this research is to confirm of how the good governance in West Telukbetung Sub district of Bandar Lampung city and to confirm the implementation of economic developmental planning in West Telukbetung Sub district of Bandar Lampung city. In this research, the researcher employs a data collecting techniques which are interview, observation, questionnaire and documentation. The analysis which is employed is qualitative analysis which is supported by frequency table and percentage table. According to the result of the research and discussion, the researcher obtains conclusions as follows: 1) Good governance in West Telukbetung Sub district of Bandar Lampung city has been implemented well, there are indicators that can be obtained such as an active participation, good legal transparency, responsive, negotiation-oriented for consensus, justice and equal treatment for all people, effective and economical and accountable. 2) the implementation of economic developmental planning in West Telukbetung Sub district of Bandar Lampung city has run well although there are some constraints where those constraints can be addressed together with the government elements and society and also intended party which has an interest for the economic developmental planning.

Keywords : good governance, planning, economics development

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan dengan salah satu turunan operasional dari good governance, yaitu multi-stakeholder proses atau forum lintas pelaku. Fahmi, Zakaria (2005;25). Yang menjadi inti multi-stakeholder adalah adanya pemerataan, keadilan, prinsip demokrasi, dan adanya partisipasi dari seluruh pihak. Dimana dalam menciptakan good governance melalui multi-stakeholder ini pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat harus saling menopang dan menjalankan fungsinya dengan baik. Musyawarah Perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Musrenbang Kecamatan Telukbetung Barat dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kecamatan Telukbetung Barat adalah salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung yang telah melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. Kecamatan Telukbetung Barat sudah melaksanakan Musrenbang sejak 2004 hingga sekarang.

Dari Musrenbang Kecamatan Telukbetung Barat telah dicapai kesepakatan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2018 terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik.

Pada perbaikan fisik yang dilakukan adaah perbaikan jalan, perbaikan (rehab total) kantor kelurahan, perbaikan saluran air, normalisasi kali baru (kali mati), pembangunan aula, musholla, pemagaran kelurahan, pembangunan masjid dan perbaikan Sekolah Dasar (SD). Sedangkan pada pembangunan non fisik yaitu penyuluhan dan pelatihan tentang home industry, bimbingan remaja (Narkoba dan Sex Bebas), peningkatan gizi, pelatihan PKK, pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an, pelatihan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Pembinaan UKM dan Musyawarah.

Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional (RPN) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pelaku pembangunan disini adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik dan organisasi massa.

Bila kita lihat keadaan Musrenbang Kecamatan telukbetung Barat sangat menarik sebab dalam pelaksanaannya belum terlihatnya peran

sektor privat sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang di dalamnya melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan sektor privat.

Unsur pembangunan perekonomian di Kecamatan Telukbetung Barat mulai berkembang cukup pesat dengan menggeliatnya perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, disini sektor swasta mulai campur tangan dalam membangun perekonomian dengan banyaknya berdiri komplek-komplek pertokoan, Pasar Swalayan, pusat grosir dan pasar-pasar tradisional.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *good governance* di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Moleong, (2006;4) Desain penelitian adalah kerangka konsep yang menggambarkan tahapan

dari penelitian. Adapun tahap yang digunakan dalam penelitian ini meliputi menetapkan identifikasi dan perumusan masalah, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, merumuskan kerangka pemikiran, mencari landasan teori dan menentukan metode penelitian, menetapkan populasi dan sampel, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, melakukan analisa data dan menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Ruang lingkup penelitian terbatas pada proses pelaksanaan perencanaan pembangunan, sedangkan lingkup lokasi terbatas pada Kantor Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui bagaimana good governance di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung yang diukur melalui partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsive, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota

Bandar Lampung diukur melalui Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari unsur perangkat desa, ketua lingkungan, DPRD Kota, Bappeda Kota dan unsur organisasi yang ada di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sebanyak 50 orang.

Sedangkan sumber informasi hanya diambil 20% dari jumlah populasi yang ada sehingga sampel atau responden sebanyak 10 orang saja.

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dari para responden adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, Winarno Surakhmad, (2000:23) menyatakan bahwa observasi yaitu mengumpulkan data-data atau keterangan-keterangan yang akan dilaksanakan dengan pengamatan secara langsung ditempat objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan (pengamatan langsung), yaitu terkait dengan karakteristik maupun kondisi lingkungan masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

Wawancara, Djumhur dan Muh. Surya, (1985:11), menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Bimo walgito, (1987:11), menyatakan bahwa wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan data dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan / *face to face relation*

Dokumentasi, menurut Paul Otlet, (2001:13) menyatakan bahwa dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen yang sudah tersimpan. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data, keterangan-keterangan, bahan tertulis dan mendapatkan data melalui dokumen yang berbentuk tulisan atau file-file yang ada di Kantor Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

Analisis yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif deskriptif yang dimana didukung dengan tabulasi frekwensi dan

prosentase. Analisis Kualitatif Deskriptif merupakan analisis yang berupa kajian terhadap hasil partisipasi masyarakat, faktor-faktor pengaruh serta dampaknya terhadap perencanaan pembangunan.

Untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk mengeliminir derajat kesalahan dan perlunya tindakan urgen peneliti untuk menghindari validity threat (bias/validitas semu/validitas palsu).

Tresiana (2013;143) mengatakan bahwa sehubungan dengan pembuktian ilmiah dalam prosedur penelitian kualitatif baik valifitas dan rehabilitas, maka penelitian kualitatif menerapkan prinsip “triagulasi” Triangulasi menyangkut 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a. Triangulasi data, yaitu memanfaatkan berbagai sumber data.
- b. Triangulasi peneliti, yaitu melibatkan berbagai peneliti yang berbeda latar belakang keilmuannya.
- c. Triangulasi teori, yaitu menggunakan perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan serangkaian data yang terkumpul.
- d. Triangulasi metode, yaitu penggunaan berbagai metode untuk mempelajari suatu persoalan,

termasuk juga dalam triangulasi perpanjangan rentang waktu penelitian dan tindakan tindak lanjut penelitian dimasa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai penelitian yang telah penulis laksanakan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu yang mencakup jenis kelamin dan umur yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	%
1	Laki-laki	8	71,43
2	Perempuan	2	28,57
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan, dengan demikian diharapkan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat dapat dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah yang meskipun responden lebih banyak laki-laki, namun tidak dapat menjadi alasan bahwa responden perempuan

untuk tidak berperan aktif dalam kegiatan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Telukbetung Barat.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	%
1	20-30 Tahun	3	30
2	31-40 Tahun	4	40
3	41-50 Tahun	2	20
4	Lebih dari 50 Tahun	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia dari 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 3 orang atau 30%, responden yang berusia antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 4 orang atau 40%, responden yang berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 2 orang atau 20% dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 1 orang atau 10%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 31 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 40%. Usia tersebut merupakan kelompok usia yang kedewasaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk melaksanakan

program dengan kebijakan Pemerintah Kota bandar Lampung di wilayah Kecamatan telukbetung Barat yang telah ditetapkan, yaitu dalam rangka pemerintahan yang baik terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dukungan dari responden yang berusia muda sangat diperlukan untuk mendukung dan memberikan pemikiran yang konstruktif kepada responden yang lebih tua agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan optimal.

Good Governance sebagai manajemen pembangunan atau administrasi pembangunan, dimana pemerintah bukanlah satu-satunya faktor untuk membangun bangsa tetapi masyarakat dan sektor swasta juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan yaitu memberikan masukan dalam proses pembangunan.

Untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik) dapat dilakukan dengan melaksanakan salah satu turunan operasionalnya yaitu *multi-stakeholder processes* (Fahmi dan Zakaria, 2005).

Kegiatan *multi-stakeholder processes* dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka dalam perencanaan pembangunan terjadi perubahan yang sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, perencanaan pembangunan bersifat *top down* dimana banyak mengabaikan kepentingan local sehingga banyak aspirasi masyarakat diabaikan. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini perencanaan pembangunan bersifat *bottom up* yang menekankan partisipasi dari banyak pihak, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh banyak pihak seperti masyarakat, sektor swasta dan pemerintah.

Sementara bila dilihat melalui pendekatan *good governance* suatu perencanaan pembangunan dapat dinilai dengan menggunakan prinsip-prinsip dari *good governance*. Prinsip-prinsip dari *good governance* adalah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka, partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan

berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pemerintahan yang baik apa yang cenderung diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Menurut Saudara Dalam Pengambilan Keputusan, Apakah Semua Warga Mempunyai Suara

No	Partisipasi Aktif	Jumlah Responden	%
1	Mempunyai semua	10	100
2	Tidak mempunyai		
3	Tidak mempunyai sama sekali		
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden dalam pengambilan keputusan yang bersifat partisipasi dan mempunyai hak mengungkapkan pendapat sebanyak 10 orang atau 100 %, tidak mempunyai hak tidak ada dan tidak mempunyai sama sekali juga tidak ada.

Dapat dijelaskan bahwa mengungkapkan pendapat dalam berpartisipasi yang diikuti oleh anggota masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat pada umumnya adalah unsur pemerintahan, karena merekalah yang mengetahui rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga dengan pendapat-pendapat

mereka dapat menambah perencanaan yang selanjutnya diharapkan dapat dikontribusikan pula terhadap upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan. Responden juga pada umumnya mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun lebih cenderung hanya mengikuti saja.

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi, untuk mengetahui hasil penelitian mengenai tegaknya supremasi hukum di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Apakah Menurut Saudara Good Governance Selalu Dilandasi Dengan Tegaknya Supremasi Hukum

No	Tegaknya Supremasi Hukum	Jumlah Responden	%
1	Selalu	6	60
2	Tidak Selalu	3	30
3	Kadang-kadang	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang memberi penilaian bahwa good governance selalu dilandasi supremasi hukum yang menyatakan selalu sebanyak 6 orang atau 60%, yang menyatakan tidak selalu 3 orang atau

30% dan yang menjawab kadang-kadang 1 orang atau 10%.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa, warga masyarakat Kecamatan Telukbetung Barat lebih condong menyatakan bahwa pemerintahan yang baik selalu diikuti dengan tegaknya supremasi hukum.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau manusia.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai good governance dalam transparansi informasi di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Apakah Menurut Saudara Arus Informasi Dalam Pemerintahan Kecamatan Sudah Transparansi

No	Transparansi	Jumlah Responden	%
1	Sudah	8	80
2	Belum	2	20
3	Belum sama sekali		
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden

cenderung menyatakan bahwa arus informasi dalam pemerintahan kecamatan sudah transparansi dan yang menyatakan sudah sebanyak 8 orang atau 80% dan yang menyatakan belum sebanyak 2 orang atau 20% dan yang menyatakan belum sama sekali tidak ada.

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai good governance terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi yang diadakan oleh masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Apakah Menurut Saudara Stakeholder Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sudah Melayani Masyarakat

No	Peduli Pada Stakeholder	Jumlah Responden	%
1	Sudah	7	70
2	Belum	2	20
3	Belum sama sekali	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang sudah terlayani dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi sebanyak 7 orang atau 70%, belum

sebanyak 2 orang atau 20 dan belum sama sekali sebanyak 1 orang atau 10%.

Responden yang sudah merasa terlayani dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi kecamatan khususnya Kecamatan Telukbetung Barat selalu hadir dalam setiap pertemuan, menjelaskan bahwa mereka berusaha senantiasa hadir dalam pertemuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini ditemukan fakta, bahwa responden yang selalu hadir dalam setiap pertemuan organisasi atau pertemuan masyarakat adalah mereka yang menjadi unsur pimpinan suatu lembaga, seperti perangkat kelurahan, ketua lingkungan, unsur kecamatan serta organisasi yang ada di Kecamatan Telukbetung Barat seperti organisasi pemuda, wanita, keagamaan dan lain-lain.

Dijelaskan pula oleh responden, bahwa intensitas kehadiran dalam pertemuan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil dalam rapat, sehingga dengan banyaknya warga/anggota yang hadir, maka keputusan dapat dicapai secara mufakat/bulat. Ini akan dapat memberikan keuntungan, yaitu berupa dukungan atau bantuan baik moril

maupun materiil dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi yang diberikan oleh stakeholder.

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai good governance terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi tentang berorientasi pada konsensus di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Apakah Menurut Saudara Good Governance Menjembatani Kepentingan Yang berbeda Demi Terciptanya Konsensus

No	Berorientasi Pada Konsensus	Jumlah Responden	%
1	Ya	10	100
2	Tidak		
3	Kadang-kadang		
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan ya sebanyak 10 orang atau 100%, sedangkan yang menyatakan tidak dan kadang-kadang tidak ada.

Dapat dijelaskan, bahwa responden yang memberikan sumbangan berupa pikiran, pada umumnya adalah responden yang menyatakan good governance menjembatani kepentingan yang berbeda demi terciptanya konsensus adalah masyarakat yang aktif dalam organisasi dan telah menjadi pengurus organisasi, yaitu dengan memberikan gagasan-gagasan atau pemikiran untuk kemajuan organisasi maupun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan telukbetung Barat, seperti organisasi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, LSM dan sebagainya.

1. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai good governance terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi tentang kesetaraan di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Apakah Menurut Saudara Semua Warga Masyarakat Mempunyai Kesetaraan Yang Sama

No	Kesetaraan	Jumlah Responden	%
1	Mempunyai	9	90
2	Tidak mempunyai	1	10
3	Tidak sama sekali		
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan mempunyai sebanyak 9 orang atau 90%, sedangkan yang menyatakan tidak mempunyai sebanyak 1 orang atau 10 % dan yang tidak sama sekali tidak ada.

2. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Untuk menciptakan good governance dapat dilakukan dengan melaksanakan salah satu turunan operasionalnya yaitu efektifitas dan efisien.

Tabel 9
Apakah Menurut Saudara Efektifitas dan Efisiensi Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilakukan Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Warga Masyarakat

No	Efektifitas dan Efisiensi	Jumlah Responden	%
1	Sesuai	7	70
2	Tidak Sesuai	3	30
3	Tidak Sesuai sama sekali		
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sesuai efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan ekonomi sebanyak 7 orang atau 70%, sedangkan yang menyatakan tidak sesuai sebanyak 3 orang atau 30 % dan yang tidak sesuai sama sekali tidak ada.

3. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai good governance terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi tentang akuntabilitas di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10

Apakah Menurut Saudara Para Pengambil Keputusan di Pemerintah, Sektor Swasta dan organisasi-organisasi Masyarakat Sudah Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Pembangunan

No	Akuntabilitas	Jumlah Responden	%
1	Sudah	3	30
2	Belum	1	10
3	Tidak tahu	6	60
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sudah sebanyak 3 orang atau 30%, sedangkan yang menyatakan belum sebanyak 1 orang atau 10 % dan yang tidak tahu sebanyak 6 orang atau 60%.

1.1.2. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung

Perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serat menggunakan asumsi-asumsi mengenal, masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dalam pokoknya adalah pengorganisasian, usaha yang berkelanjutan dan pemilihan keputusan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang tepat. Dengan melaksanakan perencanaan juga dapat diprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sehingga dapat diambil tindakan dengan cepat.

Untuk melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari perencanaan, sebelum melakukan pembangunan harus dilakukan perencanaan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan memiliki 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan Rencana

Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai perencanaan pembangunan dalam penyusunan rencana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Apakah Menurut Saudara Dalam merencanakan Pembangunan Selalu di dahului Dengan Penyusunan Rencana

No	Penyusunan Rencana	Jumlah Responden	%
1	Ya	8	80
2	Tidak	1	10
3	Kadang-kadang	1	10
Jumlah		10	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang melakukan perencanaan pembangunan dengan penyusunan rencana sebanyak 8 orang atau 80%, yang tidak melakukan sebanyak 1 orang atau 10% dan yang menyatakan kadang-kadang juga sebanyak 1 orang atau 10%.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai perencanaan pembangunan tanpa adanya penyusunan rencana

Menurut Bapak Camat Telukbetung Barat yang menyatakan bahwa :

Tanpa adanya penyusunan rencana seperti mengumpulkan informasi tentang kondisi lokal, kebutuhan apa yang diperlukan dan sikap tanpa disertai pengembangan program dan proyek maka hal tersebut akan gagal (wawancara tanggal 23 Mei 2019)

2. Penetapan Rencana

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan

langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Bagaimana penetapan rencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan

Menurut Bapak Camat Telukbetung Barat yang menyatakan bahwa :
Penetapan. “Merencanakan berarti memilih”, artinya perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan kemudian ditetapkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor0faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan sehingga penetapan yang dipilih tidak salah. (wawancara tanggal 23 Mei 2019)

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian rencana tersebut oleh pimpinan.

Dalam perencanaan pembangunan apa yang seharusnya dilakukan agar pembangunan terarah

Menurut Bapak Camat Telukbetung Barat yang menyatakan bahwa :
Dalam suatu perencanaan pembangunan itu selalu dikendalikan dalam pelaksanaan rencananya agar tujuan pembangunan tepat sasaran apabila seluruh unsur yang berhubungan dengan pembangunan diikutsertakan maka perencanaan pembangunan akan mencapai tujuan yang diinginkan. (wawancara tanggal 23 Mei 2019)

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan

sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai perencanaan pembangunan dalam evaluasi pelaksanaan rencana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12
Menurut Saudara Apakah Dalam
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Selalu
Menganalisa Data dan Informasi

No	Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Jumlah Responden	%
1	Selalu	9	90
2	Tidak selalu	1	10
3	Kadang-kadang		
Jumlah		10	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan selalu sebanyak 9 orang atau 90%, yang tidak selalu sebanyak 1 orang atau 10% dan yang menyatakan kadang-kadang tidak ada.

Keempat tahapan diselenggarakannya secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan pembangunan yang utuh.

Perencanaan pembangunan di Kecamatan Telukbetung Barat

dilakukan melalui suatu musyawarah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang sendiri dilakukan secara bertahap dari tingkat Kelurahan, dimana hasil dari Musrenbang tingkat Kelurahan menjadi vahan masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kelurahan digunakan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Hasil Musrenbang akan menjadi bahan masukan bagi Musrenbang tingkatan yang lebih tinggi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka good governance terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung adalah antara lain : partisipasi aktif, tegaknya transparansi hukum, transparansi, responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan serta penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan

rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

1. Partisipasi

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Dapat dijelaskan bahwa mengungkapkan pendapat dalam berpartisipasi yang diikuti oleh anggota masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat pada umumnya adalah unsur pemerintahan, karena merekalah yang mengetahui rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga dengan pendapat-pendapat mereka dapat menambah perencanaan yang selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi pula terhadap upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan. Responden juga pada umumnya mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), namun lebih cenderung hanya mengikuti saja.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa warga masyarakat Kecamatan Telukbetung Barat lebih condong menyatakan bahwa pemerintahan yang baik selalu diikuti dengan tegaknya supremasi hukum.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.

4. Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

Dijelaskan pula oleh responden, bahwa intensitas kehadiran dalam pertemuan tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil dalam rapat, sehingga dengan banyaknya warga/anggota yang

hadir, maka keputusan dapat dicapai secara mufakat/bulat. Ini akan dapat memberikan keuntungan, yaitu berupa dukungan atau bantuan baik moril maupun materiil dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi yang diberikan oleh stakeholder.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

Dapat dijelaskan, bahwa responden yang memberikan sumbangan berupa pikiran, pada umumnya adalah responden yang menyatakan good governance menjembatani kepentingan yang berbeda demi terciptanya konsensus adalah masyarakat yang aktif dalam organisasi dan telah menjadi pengurus organisasi, yaitu dengan memberikan gagasan-gagasan atau pemikiran untuk kemajuan organisasi maupun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan di Kecamatan

Telukbetung Barat, seperti : organisasi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang taruna, LSM dan sebagainya.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Penyusunan Rencana

Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Tanpa adanya penyusunan rencana seperti mengumpulkan informasi tentang kondisi lokal, kebutuhan apa yang diperlukan dan sikap tanpa disertai pengembangan program dan proyek maka hal tersebut akan gagal.

10. Penetapan Rencana

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Penetapan. “Merencanakan berarti memilih”, artinya perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan kemudian ditetapkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat

dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan sehingga penetapan yang dipilih tidak salah.

11. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian rencana tersebut oleh pimpinan.

Dalam suatu perencanaan pembangunan itu selalu dikendalikan dalam pelaksanaan rencananya agar tujuan pembangunan tepat sasaran apabila seluruh unsur yang berhubungan dengan pembangunan diikutsertakan maka perencanaan pembangunan akan mencapai tujuan yang diinginkan.

12. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Perencanaan pembangunan di Kecamatan Telukbetung Barat dilakukan melalui suatu musyawarah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang sendiri dilakukan secara bertahap dari tingkat Kelurahan, dimana hasil dari Musrenbang tingkat Kelurahan menjadi vahan masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kelurahan digunakan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Hasil Musrenbang akan menjadi bahan

masukan bagi Musrenbang tingkatan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Good governance di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sudah dapat dilaksanakan dengan baik adapun indikatornya antara lain Partisipasi aktif, Tegaknya transparansi hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, Efektifitas dan Efisiensi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang dimana itu dapat di selesaikan bersama-sama dengan unsur pemerintahan dan masyarakat juga pihak terkait yang berkepentingan dengan perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2002. *Metode Penelitian Karya Ilmiah*. Jakarta
- Bintoro Tjokroamidjoyo, 2001. *Pembangunan Suatu Proses Pembaharuan*, Sinar Grafika Surabaya.
- Conyers, 2002. *Perencanaan Suatu Proses Yang Berkesinambungan*, Sinar Harapan Jaya, Bandung.
- Djumhur, Muh.Surya, 1985. *Tata Cara Wawancara*, Dramedia Indonesia, Jakarta.
- Fahmi, Zakaria, 2005. *Proses Pemerintahan Yang Baik*, Mandar Maju, Bandung.
- George R. Terry dalam Riyadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo, (1999). *Pengertian Identifikasi Masalah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Jenis, Tipe dan Desain Dalam Karya Ilmiah*, Jakarta.
- Paul Otlet, 2001, *Dokumentasi Dalam Berita*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Prabu Mangkunegara, 2000, *Karakteristik Pemerintahan Yang Baik*, Rajawali Citra Persada, Jakarta.
- Riyadi, 2005. *Unsur Dasar Perencanaan*, Tarsito Eksak, Bandung.
- Siagian, 2006, *Pembangunan Dalam Perubahan*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Suryadi, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Intermedia Jakarta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waterson, 1982, *Tahapan Perencanaan Terstruktur*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Surakhmad, 2000, *Pengertian Hipotesis*, Liberty. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
-